

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM
UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI UPTD SDN 149 PENRANG
KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO**

Besse Herlina¹, Arisa², Muhammad Nur³, Haerunnisa⁴, Risma⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Pendidikan, S1/Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Puangrimaggalatung, Indonesia

Email: besseherlina23@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang. Jenis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah 5 orang. Objek dalam penelitian ini implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan di UPTD SDN 149 Penrang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar sudah telaksana dengan baik di UPTD SDN 149 Penrang terdiri dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan seluruh pelaku dan sasaran kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar.

Abstract: His study aims to describe the implementation of the Smart Indonesia Program policy in an effort to equalize education at UPTD SDN 149 Penrang The type is qualitative research using a descriptive qualitative approach The subjects of the study were 5 people The object of this study was the implementation of the Smart Indonesia Program policy in an effort to equalize education at UPTD SDN 149 Penrang The data collection techniques were observation, interviews, and documentation The data analysis technique used was descriptive analysis technique The results of this study are the implementation of the policy. The Smart Indonesia Program has been implemented well at UPTD SDN 149 Penrang consisting of communication factors, resources, dispositions, and bureaucratic structures with all actors and targets of the policy in an effort to equalize education.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberikan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, budaya, atau jenis kelamin, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakatnya (Fiqih et al., 2021).

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan awal. Kebijakan di bidang pendidikan digunakan untuk memahami kebijakan itu sendiri yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik (Solichin, 2015).

Perluasan kesempatan belajar atau biasa disebut pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis (Hakim, 2016).

Implementasi suatu program di dalam sekolah seperti Program Indonesia Pintar sangat perlu mendapatkan perhatian besar karena berpengaruh pada pelaksanaan UUD 1945 dan menjalankan Permendikbud, dengan diselenggarakannya program tersebut misalnya kurangnya sosialisasi Program Indonesia Pintar kepada masyarakat sehingga sering terjadi kesalahpahaman, *miss communication* dan kecemburuan sosial maka dari itu akan memberikan pengaruh dalam upaya pemerataan pendidikan.

Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran bantuan PIP di sekolah dasar, seperti adanya orang tua siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menanyakan kelayakan penerima PIP, sehingga pemerintah harus dapat memberikan informasi yang jelas dengan cepat dan harus dikumpulkan. Salinan bukti pencairan dana PIP berisiko tercecer atau hilang. Membuat laporan pengeluaran dengan menggunakan dana bantuan yang tidak memenuhi syarat tidak efisien karena memerlukan banyak file untuk dibuka pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, aplikasi tersebut memuat data siswa yang menerima PIP, data siswa yang mengajukan PIP, status pengeluaran atau sisa dana, laporan pengeluaran

dana, dan laporan penggunaan dana yang diperlukan. Sebuah aplikasi yang dapat menampung banyak informasi. Hal ini memudahkan kinerja administratif dalam pengambilan data, pembuatan laporan pembayaran, dan penyimpanan bukti pembayaran secara elektronik (Budiono et al., 2023).

Pelaksanaan Program Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar di Desa Penrang dinilai masih terdapat permasalahan pemberian informasi atau koordinasi dari lembaga lain seperti informasi yang disampaikan tidak valid, sehingga untuk menginformasikan, mendata dan merekap data siswa tersebut menjadi sangat lama

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dengan begitu perlu dilakukan kajian melalui penelitian, peneliti mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang” yang terletak di Desa Penrang Riawa, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo

DEFINISI OPERASIONAL

A. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar

1. Model-model Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti “mengimplementasikan”, dan juga berarti “mengeksekusi”. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat atau hasil terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan dampak atau akibat, bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, kebijakan lembaga negara dalam kehidupan berbangsa, dan lain-lain (Angreani, 2019).

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses politik. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh otoritas publik dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan (Aghnes dan Martha, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu berupa tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak guna untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah yang dibuat oleh lembaga pemerintahan.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk aturan tertulis yang menyebutkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan (Angreani, 2019).

Model-model implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Meynana dan Sari, 2020)

2. Kebijakan Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di dalamnya terdiri dari 15 pasal

B. Upaya Pemerataan Pendidikan

Kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan (Aghnes dan, Martha Ogotan, 2018).

Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh orang itu sendiri (Jannah & Isnaniah, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di UPTD SDN 149 Penrang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan dalam bentuk penafsiran dan teori. Observasi dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan dan mengetahui kondisi sebenarnya yakni bagaimana implementasi PIP dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Lukman, 2013).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dengan menggunakan wawancara terstruktur, mengenai implementasi kebijakan program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. (Sandewi, 2017)

Penelitian ini bisa dalam bentuk dokumen dari narasumber yang mampu memberikan informasi baik berupa dokumentasi data sekolah, sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Penelitian ini berupa dokumen dari narasumber yang mampu memberikan informasi baik berupa nama siswa usulan PIP, dokumentasi data siswa yang memperoleh beasiswa PIP, serta dokumen penting lainnya di UPTD SDN 149 Penrang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan pada Faktor Komunikasi

1) Transmisi

Transmisi yaitu penyaluran komunikasi berjenjang dimana kebijakan disampaikan secara berjenjang tidak hanya untuk pelaksana namun kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang terlibat implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, penyaluran kebijakan program Indonesia Pintar diperoleh dari komunikasi yang terjalin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian di sampaikan masing-masing satuan pendidikan maka dari itu, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah menyampaikan kepada operator sekolah, guru, siswa dan orang tuanya.

2) Informasi yang disampaikan harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar diterima secara jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat dilihat dari pihak sekolah dalam membantu orang tua siswa menerima bantuan Program Indonesia Pintar.



Gambar Penyampain mengenai Program Indonesia Pintar (Indikator Informasi yang disampaikan harus jelas

3) Konsistensi

Konsistensi dalam penyampaian komunikasi harus konsisten tidak berubah-ubah sehingga tidak ada simpang siur agar terjadi hambatan dan dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai konsistensi perlu kontribusi dengan sasaran kebijakan mengenai informasi yang telah disampaikan pihak sekolah seperti calon penerima merupakan siswa yang benar memerlukan bantuan dan calon penerima mempersiapkan berkas dan mengumpul berkas yang diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan/ketidaksesuaian.

Hasil uraian wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan berjalan baik karena penyaluran informasi dapat dipahami dengan jelas berdasarkan prinsip prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat dan sesuai dengan keadaan pelaku kebijakan

b. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan pada Faktor Sumber Daya

1) Sumber daya manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan

Berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai sumber daya manusia yaitu kepala sekolah dan operator sekolah perlu terlibat demi kelancaran pengelolaan penerimaan bantuan seperti memberi informasi, mengusulkan calon penerima sesuai dengan persyaratan, membantu dan memantau kelancaran proses pengambilan bantuan bersama orang tua siswa.

2) Sumber daya anggaran

Sumber daya berupa anggaran/finansial yang akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai sumber daya anggaran/finansial yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten yang diperuntukkan kepada siswa untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bantuan dana telah diterima oleh siswa dan orang tuanya.

3) Sumber Daya Peralatan

Merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasikan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai sumber daya peralatan yaitu suatu kebijakan memerlukan sarana sebagai alat penunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan program indonesia pintar seperti gedung sekolah, kursi, juga operator sekolah menggunakan fasilitas sekolah dalam membuat surat/ berkas lain sehingga bisa terlaksana dengan baik.

4) Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan otonomi yang dimiliki oleh oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan

Hasil uraian wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia telah memberikan peran banyak karena merupakan implementor kebijakan dengan adanya sumber daya anggaran, peralatan, dan kewenangan dari pemerintah dan pihak sekolah sehingga tujuan program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan bisa terlaksana.



Gambar Penerimaan Dana Program Indonesia Pintar (Indikator Sumber daya)

c. **Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan pada Faktor Disposisi**

Merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis, dan lain sebagainya

1) **Pengangkatan Birokrasi**

Pengangkatan dan pemilihan personal pelaksana kebijakan haruslah orang yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai pengangkatan birokrasi yaitu pelaksana kebijakan kepala sekolah dan operator memiliki karakteristik komitmen, jujur, dan demokratis agar seluruh siswa dapat menerima bantuan

2) Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk memecahkan masalah para pelaksana kebijakan upaya memenuhi kepentingan umum dan khusus.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai insentif, yaitu ada yang diberikan untuk operator berupa dana pembelian akses internet(kuota) namun itu, digunakan untuk membuka aplikasi secara *online* dalam penginputan di aplikasi si pintar dan kebijakan tersebut telah di sepakati bersama.

Hasil uraian wawancara disimpulkan bahwa disposisi/karakter dari implementor kebijakan yaitu komitmen, jujur, dan demokratis dan menjalankan peran agar seluruh siswa dapat menerima bantuan serta insentif yang ada memperlancar pelaksanaan tujuan kebijakan.



Gambar

Mendampingi siswa sampai penerimaan (Indikator Disposisi)

d. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan pada Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi sebelum wawancara pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar operator sekolah selaku pengelola data Program Indonesia Pintar selalu memperhatikan tanggung jawabnya dimana apabila ada nama-nama siswa penerima telah keluar setiap tahapnya dia senantiasa mengingat pekerjaannya tersebut.

a. Standar Operational Procedure (SOP)

Merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kapasitas waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai *Standar Operational Procedure* (SOP) khususnya bagi operator sekolah ada beberapa perubahan namun dari lingkup luar yaitu di bank, dan informasi sering diperoleh dengan adanya pertemuan langsung terakait cara pelaksanaan program Program Indonesia Pintar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain dari itu dan adanya perubahan juknis di bank pada proses pengambilan/pencairan

b. Fragmentasi

Merupakan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kepada beberapa badan memerlukan koordinasi

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas, pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai fragmentasi yaitu adanya pembagian tanggung jawab oleh satuan pendidikan yaitu terdapat kepala sekolah, pengolah data(operator sekolah), bendahara Program Indonesia Pintar, dan ketua komite serta orang tua siswa yang saling terakait satu sama lain untuk pelaksanaan kebijakan.

Hasil uraian wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dilakukan oleh implementor kebijakan sesuai arahan dan bimbingan teknik oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan secara langsung kepada operator sekolah dan adanya pembentukan organisasi dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar tanggung jawab masing-masing dan terkoordinasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di UPTD SDN 149 Penrang

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam implementasi kebijakan Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dapat dilihat di UPTD SDN 149 Penrang.

1) Komunikasi

Komunikasi yang baik meliputi, transmisi yaitu penyaluran komunikasi berjenjang dimana kebijakan disampaikan tidak hanya untuk pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang terlibat implementasi kebijakan, dan informasi yang disampaikan harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik, serta konsistensi dalam penyampaian komunikasi harus dilakukan sehingga tidak ada simpang siur agar tidak terjadi hambatan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Meynana dan Sari, 2020)

Pengimplemtasian kebijakan Program Indonesia Pintar di UPTD SDN 149 Penrang faktor komunikasi yaitu penyaluran komunikasi secara berjenjang kebijakan program indonesia pintar diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian di sampaikan ke masing-masing satuan pendidikan maka dari itu, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah menyampaikan kepada operator sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa.

Komunikasi implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang berjalan baik karena penyaluran informasi dapat dipahami dengan jelas berdasarkan prinsip prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat dan sesuai dengan keadaan pelaku kebijakan serta konsisten dengan kebijakan Program Indonesia Pintar No. 10 Tahun 2020 di buktikan dengan adanya penerimaan dana oleh beberapa siswa.

2) Sumber Daya

Menurut Edward III, variable selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yakni tersedianya sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan (Maulana, 2022).

Kepala sekolah dan operator sekolah berperan dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar sebagai sumber daya manusia yaitu terlibat untuk kelancaran pengelolaan penerimaan bantuan seperti mengusulkan calon penerima sesuai dengan persyaratan, membantu dan memantau kelancaran proses pengambilan bantuan.

Dengan adanya sumber daya anggaran/finansial yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten yang diperuntukkan kepada siswa untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bantuan dana telah diterima oleh siswa dan orang tuanya maka dapat dikatakan bantuan Program Indonesia Pintar telah terlaksana

Kepala sekolah sebagai pelaku utama kebijakan diberi wewenang untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia terutama operator sekolah telah memberikan peran banyak karena merupakan salah satu implementor kebijakan dengan adanya sumber daya anggaran, peralatan, dan kewenangan dari pemerintah dan pihak sekolah sehingga mendukung terlaksananya tujuan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang

3) Disposisi

Merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu Pengangkatan Birokrasi dan Insentif (Maulana, 2022)

Kepala sekolah dan operator dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar mengenai pengangkatan birokrasi yaitu memiliki karakteristik komitmen agar seluruh siswa dapat menerima bantuan, jujur dalam mengusulkan siswa yang berhak menerima, dan demokratis yaitu menerima seluruh masukan atau pendapat misalnya pada saat rapat di sekolah.

Pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar diperlukan menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik seperti adanya insentif untuk operator berupa dana pembelian akses internet (kuota) namun ini digunakan untuk membuka aplikasi secara online dalam

penginputan di aplikasi si pintar dan tersebut telah di sepakati bersama oleh orang tua siswa.

Dapat disimpulkan bahwa disposisi/karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan yaitu komitmen, jujur, dan demokratis agar seluruh siswa dapat menerima bantuan serta insentif yang ada sehingga memperlancar pelaksanaan tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang

4) Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni Standard Operational Procedure (SOP) juga sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan Fragmentasi (Maulana, 2022)

Penting adanya fragmentasi yaitu pembagian tanggung jawab oleh satuan pendidikan yaitu terdapat kepala sekolah sebagai pemimpin, pembuat keputusan dan memberikan informasi yang jelas, pengolah data (operator sekolah) membantu siswa dalam menginput dan melengkapi berkas yang diperlukan siswa, bendahara Program Indonesia Pintar yang bertanggung jawab mengetahui dan memantau alur penerimaan bantuan, dan ketua komite yang bertanda tangan sebagai bukti bahwa telah terlaksana kebijakan Program Indonesia pintar serta orang tua siswa yang saling terakit satu sama lain untuk pelaksanaan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan di sekolah itu diperlukan kerja sama di antara semua personel sekolah (guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha) dan orang di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, dokter puskesmas, Dinas Pendidikan, Masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan) (Herlina, 2024).

Disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dilakukan oleh implementor kebijakan sesuai arahan dan bimbingan

teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung kepada operator sekolah dan adanya pembentukan organisasi dalam implementasi kebijakan Perogram Indonesia Pintar sesuai tanggung jawab masing- masing dan saling terkoordinasi untuk mengelola Program Indonesia Pintar yang merata di UPTD SDN 149 Penrang.

KESIMPULAN

Implemtasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan melihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang berjalan baik karena penyaluran informasi dapat dipahami dengan jelas berdasarkan prinsip prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat dan sesuai dengan keadaan pelaku kebijakan serta konsisten dengan kebijakan Program Indonesia Pintar.

Sumber daya manusia terutama operator sekolah telah memberikan peran banyak karena merupakan salah satu implementor kebijakan dengan adanya sumber daya anggaran, peralatan, dan kewenangan dari pemerintah dan pihak sekolah sehingga mendukung terlaksananya tujuan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan.

Disposisi/karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan sangat baik yaitu komitmen, jujur, dan demokratis agar seluruh siswa dapat menerima bantuan serta insentif yang ada sehingga memperlancar pelaksanaan tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di UPTD SDN 149 Penrang.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dilakukan oleh implementor kebijakan telah terlaksana sesuai arahan dan bimbingan teknis serta adanya pembentukan organisasi dalam implementasi kebijakan Perogram Indonesia Pintar sesuai tanggung jawab masing- masing dan saling terkoordinasi untuk mengelola Program Indonesia Pintar yang merata di UPTD SDN 149 Penrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnes, Martha Ogotan, N. R. A. P.2018. Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik.online*.Vol.4(64). 43–48.
- Jannah, A. M., & Isnaniah, S. (2019). Transformasi novel ke film: kajian ekranisasi dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam dilan 1991 (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA)
- Jurfi, M., & Herlina, B. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1136-1153.
- Lukman Hakim.2016. Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.Vol 2. No 1.
- Lukman Nul Hakim.2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.*Aspirasi.(online)*, Vol. 4, No. 2, 165–172
- Meynana dan Sari Viciawati Machdum.2020. Kebijakan Program Indonesia Pintar : Studi Kasus di. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.Vol.13.No 2.
- Mia Nur Budiono, Muflih², H. M., & Wathani³, M. R.2023. Aplikasi Pendistribusian Dana PIP (Program Indonesia Pintar) Berbasis Web Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarbaru. *Eprint Uniska*.2–3.
- Muhammad Fiqih, Usep Daya, K. F.2021. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar Implementation Of The Smart Indonesia Program Policy (PIP) at the elementary school level. *Journl. Feb.Unmul.Ac.Id*.Vol.18(4).539–546. (diakses tanggal 20 Januari 2023)
- Mujianto Solichin. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178. (diakses tanggal 26 Desember 2023)
- Sofi Angreani.2019. Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah DaSar (PIP-SD) Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. *Skripsi*.